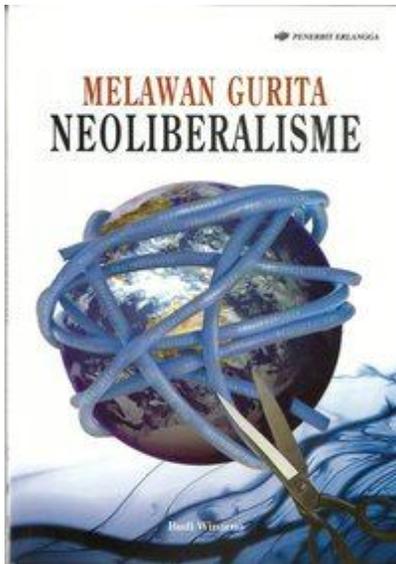


**Resensi Buku**  
**Melawan Gurita Neoliberalisme**  
**Oleh: Sugiyarto Pramono**

**Resensi Buku:**

Judul : Melawan Gurita Neoliberalisme  
 Penulis : Budi Winarno  
 Tebal : 174 halaman + x  
 Penerbit : Erlangga  
 Kota terbit : Jakarta  
 Tahun terbit : 2010

Globalisasi dengan aneka implikasi ekonomi-politiknya menjadi realitas yang nyaris tidak dapat dielaki—bila enggan untuk mengatakan tidak bisa sama sekali. Efeknya tidak hanya dapat dirasakan namun samapai pada tahap mampu mengendalikan hingga bagian

kehidupan kita yang paling pribadi sekalipun. Baik menolak maupun menerima realitas globalisasi, setiap negara atau bahkan individu di dalamnya, tetap “dipaksa” untuk masuk ke dalam arus besar ini, sehingga satu-satunya cara yang paling rasional adalah masuk ke dalamnya sembari terus-menerus mempertanggungguh diri.

Neoliberalisme sebagai ideologi dan pasar bebas sebagai implementasinya yang diusung oleh globalisasi tak pelak memiliki efek ganda yang sekaligus bertolak belakang. Eksploitasi sumber daya dan pemiskinan masal di negara-negara dunia ketiga di satu sisi sebagai keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan kebangkitan ekonomi Cina dan India di sisi lain sebagai fakta yang disuguhkan secara gamblang dan kasat mata merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak. Terhadap dua implikasi yang kontradiktif ini, maka menerima pasar bebas begitu saja atau sebaliknya menolak sama sekali kehadirannya merupakan dua cara yang sulit diterima akal sehat.

Cara paling rasional adalah mensiasati kehadiran arus besar neoliberal secara cerdas. Sudah seyogyanya negara merespon kehadiran arus besar neoliberal dengan tidak berpijak pada ideologi buta seperti mengenakan kaca mata kuda, namun berbasis pada kepentingan nasional. Membuka pasar dengan mengurangi tarif dan memberi subsidi ataupun sejumlah kebijakan lainnya menjadi langkah cerdas dalam situasi pasar domestik yang mapan, namun menjadi kebodohan yang sulit diterima ketika para pemain ekonomi nasional lemah, sebagaimana pula sebaliknya menutup pasar dengan menaikkan tarif dan menambah subsidi maupun serangkaian kebijakan sejenis menjadi tindakan bodoh ketika pasar domestik bergerak progresif namun menjadi kebijakan brilian dalam keadaan para pelaku ekonomi nasional memang membutuhkan perlindungan negara. Demikian substansi argumentasi yang dibangun dalam buku *Melawan Gurita Neoliberalisme* karya Prof. Dr. Budi Winarno, MA.

Dalam karya tersebut beliau sampai pada formula, negara tidak dapat begitu saja menyerahkan nasib ekonominya kepada mekanisme pasar bebas. Negara yang dalam hal ini diperankan oleh pemerintah diwajibkan memegang kendali perekonomiannya. Kendali atas nasib penghidupan warga negaranya tidak selalu diterjemahkan sebagai

pemegang otoritas pasar, namun negara dituntut agar sangat sadar terhadap setiap kebijakan yang ia ambil. Ketika negara harus mengambil kebijakan liberalisasi pasar maka negara harus dapat memastikan bahwa kebijakannya itu akan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonominya, sebagaimana sebaliknya ketika ia harus membatasi derajat liberalisasi bahkan hingga tahap yang paling ekstrem maka negara juga harus sangat sadar bahwa kebijakan itu akan memulihkan perekonomiannya.

Dari sudut pandang trikotomi besar dalam studi Ekonomi Politik Global (EPG), (Merkantilisme, Liberalisme dan Strukturalisme) pikiran yang ditawarkan penulis dapat dikategorikan dalam paradigma klasik Merkantilisme. Hal ini nampak sangat jelas dalam kalimat pertama sub bab ke tiga dari bab terakhir buku ini, di sana beliau menulis dengan sangat tegas, "negara-negara harus tetap melakukan peran krusial dan menentukan dalam era globalisasi ekonomi neoliberal sekarang ini, terutama dalam mengatasi apa yang disebut sebagai *the blind forces of market*" (Hal: 157).

Secara gamblang penulis menguraikan kerumitan akut

dimensi ekonomi politik dari hubungan internasional menjadi sangat sederhana, mudah dipahami namun tidak mereduksi substansi pembahasan. Konstelasi ekonomi politik global dijelaskan melalui interaksi antara negara dan pasar (Bab 1) dengan sangat apik, dalam bagian ini penulis bermaksud memberikan landasan bagi serangkaian argumentasi terkait yang lebih rumit dan mendalam pada bagian selanjutnya. Kendati penulis mengakuiistensi mekanisme pasar dalam fenomena ekonomi politik global, namun penulis sangat konsisten dengan perspektif yang ia gunakan, Merkantilisme, di mana penulis mengangkat kembali perdebatan peran negara (Bab 2).

Kerapuhan praktik pasar bebas yang berbasis neoliberalisme dipaparkan secara lugas dalam uraian bagian ketiga buku ini, di bawah tajuk, globalisasi dan krisis pembangunan (Bab 3). Memperkuat argumentasi yang dibangun secara konsisten pada bagian-bagian sebelumnya, penulis selanjutnya membahas model peran negara bangsa di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi (Bab 4), kemudian isu *good governance* (Bab 5) yang sejatinya merupakan respon dari respon balik serangan kelompok anti neoliberal atas kegagalan resep yang mereka tawarkan terhadap dunia ke tiga dibahas dengan sangat argumentatif.

Kooptasi kebijakan publik dan demokrasi poliarki dibahas dalam bab

6, di mana dua bab setelahnya (Bab 7 dan 8) merupakan studi kasus dua negara dunia ke tiga, Indonesia yang ditinjau dari sudut ketahanan pangan dan Cina dari segi ketangguhan ekonomi. Kedua negara tersebut kendati merupakan negara dunia ke tiga namun dalam perjalanannya seiring dengan terpaan arus globalisasi dan neoliberalisme justru melahirkan fenomena yang kontras, dalam pembahasan tentang Indonesia, penulis menginvestigasi kegagalan resep IMF dalam ketahanan pangan, sementara dalam kasus Cina penulis menganalisis sejumlah faktor kunci keberhasilan perekonomian Cina.

Penulis selanjutnya menutup buku ini dengan bab yang menguraikan serangkaian pelajaran dari aneka kegagalan yang diderita negara-negara dunia ke tiga (Bab 9). Gagasan yang ditawarkan penulis dalam buku ini tidak hanya akan berkontribusi pada khasanah studi EPG dan umumnya ilmu Hubungan Internasional (HI) semata, namun aneka rekomendasi dari buah pikir guru besar UGM ini tentu juga sangat layak diperhatikan para pembuat kebijakan di negeri ini.

Ngabean Kulon, Sleman, Yogyakarta, 20 Januari 2011



